



OTORITAS BAHASA DAN IMPLIKASINYA BAGI MASYARAKAT

PIDATO PENGUKUHAN

Disajikan pada Upacara
Penerimaan Jabatan Guru Besar Madya
Pada Fakultas Sastra Universitas Diponegoro
Semarang, 17 Juni 2000

Oleh

Sudaryono ,

Yang saya hormati,

Bapak Rektor/Ketua Senat.

Sekretaris Senat dan Para anggota Senat Universitas Diponegoro

Para anggota Dewan Penyantun Universitas Diponegoro,

Para pejabat negara, sipil, militer.

Para Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga.

Direktur Program Pascasarjana,

Segenap sivitas akademika Universitas Diponegoro.

Para tamu undangan.

serta para mahasiswa yang saya cintai

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabbarokatuh

Pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah saya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang telah melimpahkan Rachmat dan Hidayah-Nya, sehingga pada hari ini saya berkesempatan menyampaikan pidato pengukuhan sebagai guru besar madya di hadapan rapat senat terbuka Universitas Diponegoro dan hadirin yang saya hormati. Saya juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para hadirin yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri upacara pengukuhan ini dan sekaligus ikut meresmikan upacara pengukuhan ini.

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya mengenai pemakaian bahasa Indonesia pada dasawarsa terakhir ini. Tujuan pengungkapan ini ialah agar kita dapat mengambil hikmah dari pengalaman ini dan tidak mengulang kesalahan yang sama di masa mendatang. Pertama-tama akan diuraikan peran negara dalam pembinaan bahasa Indonesia, dan selanjutnya akan dijelaskan akibat yang ditimbulkan oleh peran itu. Tulisan ini didasari asumsi bahwa bahasa itu berubah, dan perubahan itu dapat dipengaruni, diarah-

kan, atau direncanakan. Akan tetapi perencanaan bahasa itu harus didasarkan pada sifat bahasa itu sendiri, yaitu arbitrer dan konvensional.¹ Perencanaan bahasa tanpa memperhatikan sifat bahasa itu akan mengakibatkan munculnya perbedaan penafsiran di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pemakaian bahasa. Perbedaan penafsiran itu mengindikasikan adanya ketegangan atau hubungan yang tidak harmonis antara pembicara dan kawan bicaranya.

Otoritas Bahasa

Salah satu hal yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya ialah karena manusia memiliki bahasa. Secara substansial bahasa berwujud bunyi atau tulisan yang mengandung arti. Manusia memakai bahasa untuk berbagai tujuan sebagai akibat interaksi manusia dengan manusia, alam, dan kekuatan supranatural. Secara hakiki fungsi bahasa itu ialah alat untuk menyatakan pikiran dan perasaan, alat berpikir dan merasa, dan alat memahami pikiran dan perasaan (Tampubolon, 1999:4).

Telah lama disadari bahwa bahasa itu berubah, dan perubahan itu tidak terelakkan dan tanpa kecuali. Perubahan itu terjadi melalui proses alami sesuai dengan keinginan masyarakat pemakai bahasa itu, atau melalui usaha terencana dan terarah yang disebut perencanaan bahasa. Perencanaan bahasa dapat dilakukan oleh negara melalui badan yang resmi dan secara khusus ditugasi perihal itu, atau pihak di luar negara baik kelompok atau perseorangan. Ini berarti kewenangan atau otoritas mengatur dan merencanakan perubahan bahasa ada di tangan negara atau masyarakat. Baik oleh negara atau masyarakat dalam kenyataannya peran itu dimainkan oleh minoritas kreatif² (*creative minority*), yaitu sekelompok orang yang secara kuantitatif minoritas tetapi mempunyai kreativitas untuk mempengaruhi terjadinya perubahan bahasa. Orang-orang yang berada di dalam minoritas kreatif itu terutama adalah orang-

orang yang menaruh perhatian terhadap bahasa yang dipakainya, baik itu ahli bahasa atau lainnya.

Peran minoritas kreatif sangat penting sebagai penggagas dan perumus perencanaan bahasa, tetapi keberhasilan peran itu tergantung pada dukungan negara dan masyarakat. Pada situasi otoritas bahasa dipegang oleh negara, para penggagas dan perumus perencanaan bahasa dan penyelenggara negara harus sepaham terhadap kebijakan yang ditetapkan. Artinya para penyelenggara negara harus melaksanakan apa yang telah dirumuskan dalam kebijakan perencanaan bahasa. Perilaku kebahasaan para penyelenggara negara menentukan keberhasilan kebijakan perencanaan bahasa, karena para penyelenggara negara itu menjadi model yang akan ditiru oleh masyarakatnya. Setelah masyarakat meniru atau melaksanakan kebijakan perencanaan bahasa itu, maka bahasa telah berubah sesuai dengan keinginan pemegang otoritasnya.

Dalam suatu negara yang otoritas bahasa diserahkan kepada masyarakat, seperti terjadi di Inggris atau Amerika Serikat, minoritas kreatif menawarkan kebijakan perencanaan bahasa dengan mempertimbangkan pengetahuan kebahasaan dan kenyataan pemakaian bahasa di dalam masyarakat. Negara mengakomodasi dan meresmikan bahasa yang dipakai oleh masyarakatnya. Negara memberi keleluasaan kepada masyarakat untuk menentukan dan memecahkan masalah kebahasaan yang dihadapinya. Masyarakat itu sendirilah yang mengatur dan menentukan arah perubahan bahasa.

Otoritas bahasa berimplikasi terhadap penuturnya. Jika otoritas bahasa dipegang oleh negara, maka proses perubahan bahasa dapat terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama, asal didukung oleh masyarakat sebagai pemakai bahasa itu. Akan tetapi jika otoritas yang dipegang oleh negara itu dipakai sebagai alat untuk menjaga kelangsungan kekuasaannya, maka akan terjadi protes dan penolakan masyarakat terhadap kebijakan perencanaan bahasa yang ditetapkan oleh negara. Penolakan itu

lama-kelamaan akan menurunkan wibawa negara, bahkan akan menjadi sarana untuk menurunkan pemimpin negara. Sebaliknya, otoritas bahasa yang diserahkan kepada masyarakat di satu sisi membutuhkan waktu yang lebih lama karena menunggu proses penerimaan oleh masyarakat, tetapi kecil kemungkinan terjadinya penolakan karena masyarakat itu sendirilah yang mengatur dan melaksanakan perencanaan bahasa. Selain itu, proses seperti ini sesuai dengan sifat hakiki bahasa, yaitu konvensional dan arbitrer. Bahasa bersifat konvensional dalam arti bahasa dibentuk atas dasar kesepakatan bersama di antara pemakai bahasa. Konvensi itu dapat terjadi karena bahasa bersifat arbitrer, dalam arti tidak ada motivasi atau aturan yang dipakai sebagai dasar pada proses pembentukan bahasa. Sejauh pemakai bahasa telah menyatakan kesepakatannya, yang ditunjukkan oleh kebersamaan pemakaian, maka bahasa itu telah terwujud atau ada.

Negara sebagai Pemegang Otoritas Bahasa di Indonesia

Otoritas bahasa ditentukan atas dasar politik negara. Negara yang menganut prinsip bahwa negara berhak mengatur kehidupan masyarakat, negara tersebut cenderung akan menjadi pemegang otoritas bahasa. Sebaliknya negara yang menganut prinsip bahwa negara hanya berfungsi sebagai fasilitator dan memberi keleluasaan kepada masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri, negara tersebut cenderung akan menyerahkan otoritas bahasa kepada masyarakat. Paham yang pertama mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa bahasa merupakan bagian dari kekuatan negara: mereka terbentuk bersama, berkembang bersama, dan runtuh bersama-sama pula (Illich, 1980). Sebaliknya paham yang kedua didasarkan pada prinsip bahwa masyarakat adalah pemilik dan pemakai bahasa, karena itu mereka berhak mengatur miliknya sendiri.

Di Indonesia otoritas bahasa ada di tangan negara. Hal ini terlihat dengan jelas setelah diresmikan lembaga negara yang bernama Pusat

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1975). Lembaga ini bertugas melaksanakan (1) penelitian di bidang bahasa dan susastra mengenai bahasa Indonesia dan bahasa daerah di Nusantara, termasuk perkamusan dan peristilahannya; (2) pengendalian kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa dan susastra; (3) penelitian di bidang pengajaran bahasa dan susastra mengenai bahasa Indonesia, bahasa daerah Nusantara, dan bahasa asing yang diajarkan di Indonesia; dan (4) penelaahan hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa dan susastra (Sumantri, 1978; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993). Tugas yang kedua secara eksplisit menunjukkan otoritas bahasa di Indonesia ada di tangan negara.

Pengendalian kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa dan susastra sebagai tugas penting lembaga ini dilaksanakan secara ekstensif pada masa Orde Baru. Salah satu program yang terkenal pada masa itu ialah kampanye pemakaian bahasa Indonesia dengan baik dan benar³. Selama lebih kurang dua puluh lima tahun program ini telah menyentuh kesadaran sebagian besar masyarakat Indonesia. Akan tetapi program ini tak kunjung menjadikan sebagian besar masyarakat Indonesia mahir berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, tetapi justru muncul kecenderungan sebagian besar masyarakat bertanya-tanya mengenai bagaimana seharusnya mereka berbahasa dengan sesama warga negara. Mereka berkonsultasi terlebih dahulu dengan para ahli atau guru bahasa Indonesia untuk mendapat pengesahan tentang apa yang akan mereka katakan seolah-olah mereka tidak sadar bahwa mereka sedang bercakap-cakap dalam bahasa milik mereka sendiri. Banyak orang menjadi kurang percaya diri ketika sedang bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia, apalagi jika dalam percakapan itu ada seorang ahli atau guru bahasa Indonesia.

Kenyataan ini menjadi indikasi kekurangberhasilan masyarakat bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kegagalan masyarakat

katan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di samping karena dilaksanakan dengan pendekatan otoriter juga dikendalikan oleh pandangan substansial tentang bahasa. Dewasa ini berkembang dua kelompok besar pandangan tentang bahasa. Kelompok pertama menganggap bahasa sebagai suatu sistem kaidah yang otonom, statis, tertutup, dan universal. Kelompok kedua merumuskan bahasa sebagai fenomena kemasyarakatan. Kelompok pertama disebut formalisme, sedang kelompok kedua disebut fungsionalisme (Leech, 1993: 69-70). Perbedaan yang paling penting di antara keduanya ialah: kaum formalis mengkaji bahasa sebagai sistem yang otonom, sedang kaum fungsionalis mengkaji bahasa sebagai sesuatu yang berhubungan dengan fungsi sosialnya.

Pandangan bahasa sebagai sistem yang otonom memungkinkan bahasa dideskripsikan kaidah-kaidahnya. Kegiatan berbahasa dianggap sekedar contoh perwujudan praktis dari kaidah-kaidah itu. Bahasa yang setia terhadap kaidah disebut bahasa baku, sebaliknya bahasa yang tidak setia pada kaidah disebut bahasa tidak baku. Secara sederhana dijelaskan bahwa bahasa baku dipakai dalam situasi resmi, sedang bahasa tidak baku dipakai dalam komunikasi sehari-hari. (Kridalaksana, 1967; Moeliono, 1977; Badudu, 1985). Pandangan ini menjadi dasar perlunya pembakuan bahasa.

Pandangan bahasa sebagai fenomena sosial menolak anggapan bahasa sebagai sistem tertutup dan statis. Kaidah bahasa bukan tidak diakui ada, tetapi kaidah-kaidah itu dipahami sebagai sesuatu yang dinamis, berubah sesuai dengan perubahan sosialnya. Karena masyarakat hidup dalam berbagai situasi dan tujuan, maka masyarakat membutuhkan berbagai ragam bahasa. Ragam-ragam bahasa itu harus dihargai kedudukannya dan masing-masing mempunyai kaidah-kaidah tersendiri. Hubungan kaidah dan kegiatan berbahasa bersifat timbal balik, saling membentuk dan saling mengisi. Karena itu pemilihan ragam bahasa tertentu sebagai bahasa baku atau sebaliknya perlu dipertanyakan. Bagi

mereka pembicaraan bahasa baku bukanlah prioritas yang utama. Menurut pandangan ini setiap ragam bahasa adalah baku untuk situasi dan tujuan pemakaian ragam bahasa itu.

Akhir-akhir ini mulai muncul pendapat yang meragukan keberhasilan pemasyarakatan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bambang Kaswanti Purwo (1999) menghendaki agar pendekatan otoriter dalam pemasyarakatan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ditinggalkan. Ada dua alasan yang menyebabkan dia sampai pada usulan itu, yaitu (1) telah terjadi perbedaan tafsiran mengenai arti "bahasa yang baik dan benar," dan (2) pengertian benar dan tidak benar kini cenderung campur aduk. Kini banyak orang menganggap bahasa yang baik dan benar identik dengan bahasa baku. Padahal baik dan benar merupakan dua hal yang terpisah. Baik mengacu pada situasi pemakaian, dan benar mengacu pada ketaatan pada kaidah tatabahasa. Karena itu bahasa baku yang benar menurut kaidah tatabahasa hanya dipakai pada situasi yang baik, yaitu situasi resmi. Sebaliknya pada situasi yang tidak baik, yaitu situasi tidak resmi, kita boleh memakai bahasa yang tidak baku. Mengidentikkan bahasa yang baik dan benar dengan bahasa baku memeraanggapkan kita harus selalu berbahasa baku.

Pengertian benar dan tidak benar yang seharusnya mengacu pada kebenaran tatabahasa juga ditafsirkan berdasar situasi pemakaiannya. Pencampuran ini terjadi karena situasi komunikasi resmi dipahami secara tulus dan terpisah dari situasi komunikasi tidak resmi. Padahal kenyataannya hampir tidak ada peristiwa tutur yang awal dan akhirnya tetap hampir sebagian peristiwa tutur, kecuali pada situasi yang oleh Martin Ross⁴ (1967) disebut beku, merupakan campuran atau perpindahan situasi komunikasi resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Kenyataan ini mempersempit kemungkinan pemakaian bahasa baku. Diperkirakan bahasa baku hanya dipakai dalam situasi yang sangat formal atau beku, seperti dalam ritual agama, atau penggunaan bahasa tulis yang dilisan-

kan. Pada situasi lainnya penggunaan bahasa cenderung berfluktuasi antara bahasa baku, setengah baku, dan yang tidak baku. Semakin lama suatu peristiwa tutur, semakin besar kemungkinan ber-campurnya bahasa yang dipakai.

Kritik tajam terhadap bahasa yang baik dan benar dikemukakan oleh Virginia Mathesson Hooker dan Daniel Dhakidae. Virginia Mathesson Hooker mengatakan bahwa membakukan bahasa adalah contoh "manipulasi" bahasa. Setelah meneliti bahasa yang dipakai dalam pidato-pidato kepresidenan pada masa Orde Lama dan Orde Baru, Virginia Mathesson Hooker (1996) sampai pada simpulan bahwa yang diakui sebagai bahasa baku hanyalah ungkapan-ungkapan model pejabat. Ungkapan-ungkapan pejabat atau bahasa pidato pejabat itu bermula dari pemakaian bahasa Indonesia oleh presiden yang kemudian diikuti oleh pejabat-pejabat lain sebagai konsekuensi logis budaya paternalistik yang ada di Indonesia. Bahasa pidato pejabat yang kemudian diakui sebagai bahasa baku semula berasal dari para penulis teks pidato yang sebelumnya telah berkonsultasi dengan para perencana pembakuan bahasa. Lama-keiamaan bahasa yang diakui sebagai bahasa baku itu akan menjadi bahasa tipikal. Bahasa tipikal itu mempunyai karakteristik sebagai hasil upaya untuk mengefisienkan perilaku linguistik, berkejaran dengan perubahan teknologi global yang cepat, dan karena itu akan muncul gejala alienasi bahasa Indonesia dari komunitas bahasa secara luas (Dhakidae, 1996:248).

Selain melalui lembaga negara yang bernama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, otoritas bahasa di Indonesia juga dikendalikan oleh perangkat negara lainnya. Akan tetapi harus disadari bahwa pemegang kekuasaan di Indonesia di masa lampau tidak dapat disamaratakan atau dianggap sebagai suatu kelompok yang terpadu. Akibatnya tidak jarang kita sendiri tidak mengetahui dari mana asalnya suatu kebijakan yang ada di tengah-tengah kita. Implementasi otoritas bahasa

sebagai upaya pengendalian sistem-sistem komunikasi di masa lampau adalah salah satu contohnya. Upaya pengendalian itu dilaksanakan dengan monopoli pemaknaan atau hegemoni makna. Di masa lampau negara dengan sengaja memaknai kata-kata tertentu sesuai dengan keinginannya. Interpretasi terhadap makna lain selain yang diinginkan oleh negara ditutup demi stabilitas dan kelangsungan pembangunan nasional. Lewat kontrol bahasa seperti itu ditanamkan ideologi dan program-program negara.

Monopoli pemaknaan dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya pemberian makna baru (yang berbeda dari makna konvensionalnya), dan pemakaian eufemisme yang menyimpang. Untuk membentuk citra negara Orde Baru sebagai negara yang bersih dimunculkan istilah *bersih lingkungan*. Gabungan kata ini tidak dimaksudkan sebagai kebersihan lingkungan fisik seperti yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya, tetapi diberi makna yang lebih spesifik, yaitu bersih dari anasir-anasir ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Contoh lain tentang hegemoni makna seperti ini adalah:

penataan (sistem kelembagaan)	=	perombakan
normalisasi (kehidupan kampus)	=	pengekaungan

Puncak dari monopoli pemaknaan terjadi pada penafsiran tunggal atas Pancasila sebagai dituangkan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila⁵ (P4). Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dirumuskan menjadi butir-butir Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang pertama, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, dirumuskan menjadi 4 butir, sila yang kedua menjadi 8 butir, dan seterusnya. Penentuan butir-butir Pancasila itu menjadi hak monopoli negara. Interpretasi lain selain yang dikehendaki oleh negara dianggap tidak ada, dan karena itu dalam dunia pendidikan interpretasi lain itu dianggap salah sehingga mengurangi nilai dalam pelajaran Pendidikan Moral Pancasila di masa itu.

Bentuk lain yang dipakai untuk memonopoli makna ialah eufemisme. Eufemisme ialah pemakaian kata atau bentuk lain untuk menghindari larangan atau tabu (Kridalaksana, 1982:42; Mc Kenzie, 1995: 246-261). Alasan lain pemakaian eufemisme ialah untuk menghindari perasaan tidak enak atau demi sopan santun. Untuk menghindari perasaan jijik atau demi sopan santun kita mengatakan *ke belakang* untuk maksud *berak* atau *kencing*, *tinususila* atau *tunawisma* untuk mengganti *pelacur* dan *gelandangan* dan seterusnya. Eufemisme sangat bermanfaat jika dipakai sebagaimana mestinya. Akan tetapi eufemisme akan menjadi endemi sosial jika dipakai menyimpang (Wardhough, 1986:231).

Pada masa Orde Baru eufemisme dipakai untuk tujuan tertentu, yaitu menutup informasi yang sebenarnya. Kata-kata diperhalus maknanya agar perbuatan kasar dianggap halus, yang salah dianggap benar, dan yang menyimpang dianggap biasa. Berikut ini adalah beberapa contoh eufemisme yang dimaksud.

diamankan	'dipenjara'
dijemput	'ditangkap'
discsuaikan	'dinaikkan'
dibebastugaskan	'dipecat'

Pemakaian eufemisme seperti ini menyimpang karena makna dibentuk secara sepihak sehingga melanggar azas arbitrer dan konvensional. Makna dibentuk secara sepihak sehingga tidak sesuai dengan konvensi yang ada di dalam masyarakat. Padahal makna bahasa itu arbitrer, dalam arti tidak ada motivasi, kekuasaan, atau undang-undang dipakai untuk membentuk makna. Sedangkan melanggar konvensi karena untuk menyatakan makna seperti itu sebenarnya telah tersedia kata-kata yang berterima oleh masyarakat. Di satu sisi pemakaian eufemisme yang menyimpang efektif bagi negara untuk menutupi maksud yang sebenarnya, tetapi pada sisi yang lain justru menimbulkan kecurigaan bagi masya-

rakat terhadap apa yang dikatakan oleh negara. Sikap seperti ini akhirnya akan menimbulkan ketidakpercayaan, bahkan timbul penafsiran yang berkebalikan dengan apa yang diinginkan negara. Ketika negara mengatakan A, masyarakat justru memahaminya dengan logika terbalik, yaitu sebagai B, seperti ketika diumumkan tidak akan ada penutupan bank ternyata kemudian beberapa bank dilikuidasi.

Hadirin, yang saya hormati,

Setelah diuraikan implementasi otoritas bahasa oleh negara, berikut ini akan diuraikan implikasi dari implementasi itu. Setidaknya-tidaknya ada dua hal yang kita rasakan berkenaan dengan hal itu, yaitu (1) kecenderungan bahasa Indonesia bersifat feodal, dan (2) tumbuh suburnya implikatur.

Bahasa Indonesia Cenderung Bersifat Feodal

Feodalisme ialah sistem sosial yang mengakui adanya stratifikasi sosial. Di dalam masyarakat yang feodal, masyarakat terbagi atas beberapa kelas sosial. Kelas bangsawan atau priyayi lebih tinggi kedudukannya daripada kelas petani atau rakyat biasa, dan karena itu kelas bangsawan mendominasi kelas petani. Perbedaan kelas-kelas sosial dibentuk melalui perbedaan bentuk bahasa yang dipakai untuk menunjukkan perbedaan tingkat kedudukan pemakai bahasa serta berbagai tatacara dalam pergaulan bernasyarakat.

Bahasa Jawa adalah contoh bahasa yang feodal. Di dalam bahasa Jawa dikenal beberapa tingkatan untuk menunjukkan ragam halus dan kasar. Bahasa Jawa halus mempunyai beberapa varian⁶ lagi, begitu pula bahasa Jawa kasar. Bahasa Jawa halus atau "krama" dipakai oleh para bangsawan atau priyayi, sedang masyarakat biasa berbahasa Jawa kasar atau "ngoko". Semua kata yang ada dalam ragam "krama" mempunyai padanan dalam ragam "ngoko," tetapi tidak semua kata ragam "ngoko"

berpadanan dengan ragam “krama”. Akibatnya para bangsawan yang berbahasa Jawa “krama” bisa berbicara dengan mudah dalam ragam “ngoko”, sebaliknya masyarakat biasa akan mengalami kesulitan dalam berbahasa Jawa ragam “krama.” Kesulitan ini menimbulkan jarak sosial dan meninggikan derajat pemakai bahasa Jawa krama.

Bahasa Indonesia yang baik dan benar mengasumsikan adanya bahasa Indonesia baku dan yang tak baku. Bahasa Indonesia baku dipakai dalam situasi resmi oleh masyarakat yang berlatar belakang pendidikan, sosial, dan ekonomi yang cukup dan tinggi, sebaliknya bahasa Indonesia tak baku dipakai dalam situasi tak resmi oleh masyarakat yang berlatar belakang pendidikan, sosial, dan ekonomi rendah. Secara kasar situasi ini mirip dengan situasi dalam bahasa Jawa. Bahasa Indonesia baku dipakai oleh kelas sosial menengah-atas (terutama para pejabat) karena kelas sosial ini lebih banyak menghabiskan hidupnya dalam situasi resmi di kantor, sedang bahasa Indonesia tak baku dipakai oleh kelas sosial bawah karena sebagian besar hidupnya berada di situasi tak resmi. Sudah barang tentu kemiripan ini berbeda intensitasnya, karena bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi sebagian besar penutur bahasa Indonesia.. Akan tetapi tanda-tanda kemiripan itu sudah tampak.

Kampanye bahasa Indonesia yang baik dan benar menempatkan bahasa baku lebih tinggi kedudukannya daripada bahasa tak baku seperti dikatakan oleh Bambang Kaswanti Purwo (1999). Sikap merendahkan ragam tak baku dapat dianggap sebagai ketiadaan kesetaraan berbagai ragam yang ada dalam bahasa Indonesia. Sikap merendahkan ragam tak baku di samping membentuk Bahasa Indonesia yang feodal (karena ciri utama feodalisme ialah ketiadaan kesetaraan), juga dapat menjadi bumerang bagi usaha menbuai orang cinia pada ragam baku dan dengan rela hati menggunakannya pada konteks yang sesuai.

Hadirin yang saya hormati,

Proses pembentukan bahasa Indonesia baku dan yang tak baku berfungsi sebagai “krama” dan “ngoko” dalam bahasa Jawa menempuh jalan yang mirip. Anderson (1982: 76-77) mengatakan bahwa bahasa Jawa krama sebenarnya merupakan penggunaan yang dibikin-bikin terhadap bahasa yang lazim di kalangan orang Jawa, dan bahasa Jawa krama itu terbentuk karena memang dengan sadar dibentuk para penguasa Jawa sesudah abad ke-18 sebagai kompensasi dari hilangnya kekuasaan kongkrit. Pendapat yang sama dikatakan oleh G. Moedjanto (1985: 271). Dia mengatakan bahwa tataran ngoko-krama memang sengaja dikembangkan sehingga menjadi rumit sebagai alat politik, justru karena dinasti Mataram menyadari dirinya berasal dari kalangan petani. Untuk meninggikan derajatnya dan menjaga jarak sosial, proses perumitan itu ditempuh sebagai upaya untuk mencapai tujuan itu. Kemiripan proses pembentukan bahasa Indonesia baku dan yang tak baku dengan bahasa Jawa krama dan ngoko yang didasari oleh motivasi yang disengaja dan bertujuan menaikkan derajat dan menciptakan jarak sosial cukup menjadi indikasi munculnya sifat feodal dalam bahasa Indonesia.

Selain melalui ragam baku dan yang tak baku, feodalisme bahasa Indonesia juga tumbuh melalui kata-kata (walaupun belum sebanyak dan sistematis seperti dalam bahasa Jawa) seperti contoh berikut:

wafat	-	meninggal
dimohon	-	diminta
beliau	-	dia
bapak/ibu/anda-		kamu
yang mulia	-	yang dihormati
usia	-	umur
amanat	-	pidato

Tumbuh-suburnya Implikatur dalam Bahasa Indonesia

Bahasa mengandung unsur bentuk dan makna. Bentuk bahasa diwujudkan melalui bunyi/tulisan, dan bentuk itu menyatakan makna. Makna menjadi khazanah pengetahuan masyarakat sebagai sarana berkomunikasi. Benjamin Lee Whorf (1958) mengatakan bahwa bahasa bukan saja merupakan instrumen untuk berkomunikasi, tetapi sebenarnya juga mendefinisikan kehidupan itu sendiri. Makna terbentuk secara konvensional dan terkodifikasikan ke dalam kamus-kamus bahasa.

Di samping menyatakan makna, bahasa juga mengandung implikatur. Implikatur (*implicature*) adalah sesuatu yang ditangkap oleh pendengar/pembaca yang berbeda dari makna konvensionalnya (Brown dan Yule, 1983:31). Tuturan seorang ibu kos yang ingin memberi tahu tamu anak kosnya berikut adalah contoh tuturan yang mengandung implikatur.

- (1) Dik, sekarang sudah pukul 10 malam.
- (a) waktu menunjukkan pukul 22.00 WIB
- (b) sebaiknya anda segera pulang

Tuturan (1) di samping mengandung makna pemberitahuan tentang waktu (1a) juga mengandung implikatur permintaan agar tamu itu segera pulang (1b). Pemahaman kita atas implikatur didasarkan pada praanggapan sebagai pengetahuan bersama (*common ground*) sehingga tidak perlu diutarakan. Implikatur dari tuturan (1) terbentuk karena sama-sama dipahami bahwa seorang tamu (pria) tidak boleh mengunjungi teman (wanita) hingga melebihi pukul 22.00 WIB. Berdasar praanggapan "*Batas waktu bertamu pukul 22.00 WIB*" itulah muncul implikatur dari tuturan (1), yaitu (1b). Clark (1977) merumuskan praanggapan sebagai "*the missing link*" yang menghubungkan tuturan dan implikturnya. Semakin akrab hubungan antara pembicara dan pendengar, semakin banyak mereka berbagi pengalaman dan pengetahuan dan makin banyak pula praanggapan yang tidak mereka ungkap-

kan, tetapi akan menjembatani di dalam interaksi verbal mereka. Sebaliknya jika pembicara dan pendengar kurang akrab atau berasal dari lingkungan budaya yang berbeda, mereka sering tidak menangkap implikatur dari tuturan yang didengarnya karena ketidakpahaman pranggapan yang menjembatani implikatur dari tuturan yang didengarnya.

Makna konvensional terkodefikasikan ke dalam kamus-kamus bahasa, sedangkan implikatur menjadi pengetahuan yang hidup dinamis dan tersimpan dalam memori masyarakat. Munculnya implikatur ditentukan oleh kebenaran dan pemahaman masyarakat atas tuturan yang didengarnya. Seseorang yang menentukan sesuatu yang tidak benar, karena itu berbeda dengan makna konvensional, tuturan itu akan menimbulkan implikatur.

Dewasa ini implikatur menjadi objek yang menarik perhatian dalam pengkajian wacana (*discourse analysis*), pragmatik, dan semantik antropologi. Parkin (1982) mengatakan bahwa implikatur dibentuk oleh kultur masyarakat atas dasar interaksi masyarakat terhadap konsep yang dipahaminya. Oleh karena itu untuk memahami implikatur harus memahami terlebih dahulu apa yang sedang menjadi wacana bagi masyarakatnya. Implikatur muncul ketika pembicara dan pendengar berada dalam wacana yang berbeda, atau terdapat jarak yang memisahkan mereka. Sejauh pembicara dan pendengar bersatu dalam pemahaman, implikatur tidak muncul. Sebaliknya, jika pendengar memahami fakta atau kebenaran yang berbeda dengan apa yang dituturkan oleh pembicara, maka implikatur muncul dengan fungsi yang signifikan.

Pada masa Orde Baru ketika bahasa dipakai sebagai sarana legitimasi kekuasaan melalui monopoli pemaknaan, implikatur tumbuh subur. Implikatur dibentuk melalui proses *plesetan*⁷, yaitu dengan sengaja memaknai tuturan berbeda dari makna konvensional. Plesetan dianggap sebagai cara untuk melawan atau menolak, dan cara ini sangat efektif dan produktif pada masa akhir kejayaan Orde Baru.

Pada masa Orde Lama di Jawa dikenal ungkapan "*bersih desa*" untuk menyatakan kebersihan lingkungan fisik (dan juga spiritual) terutama setelah masyarakat desa selesai panen hasil pertanian. Pada masa Orde Baru di samping *bersih desa* muncul ungkapan *bersih lingkungan* tetapi negara memberi makna yang berbeda walaupun pola pembentukannya sama, yaitu 'bersih dari anasir ekstrem kiri dan ekstrem kanan'. Ketika masyarakat berada pada wacana yang sama dengan negara, ungkapan itu dipahami dengan makna yang sama oleh masyarakat dan negara. Akan tetapi pada masa reformasi ketika masyarakat berbeda wacana dengan negara, ungkapan itu diplesetkan sehingga muncul implikatur sebagai berikut:

- (2) bersih lingkungan
- (a) bersih KKN
- (b) bersih dari lingkungan Cendana

Bahkan kata *reformasi* yang menjadi kata kunci dari gerakan reformasi pun diplesetkan sehingga menimbulkan implikatur sebagai berikut:

- (3) reformasi
- (a) repot nasi

Berikut ini adalah contoh tuturan dan implikaturannya:

- (4) KUHP
- (a) Kasih Uang Habis Perkara
- (5) KPU
- (a) Kepengin Punya Uang
- (b) Komplotan Penilep Uang
- (5) UNS
- (a) Untuk Nurunin Soeharto
- (b) Untuk Ngadili Soeharto
- (6) sembako
- (a) semangat bakar toko

Implikatur mengganggu proses komunikasi, karena adanya implikatur proses menafsirkan dalam komunikasi menjadi semakin tak transparan, bahkan berubah menjadi tebak-tebakan yang akhirnya justru akan menjadikan komunikasi itu gagal. Komunikasi dianggap berhasil jika terdapat kesamaan pemahaman di antara peserta komunikasi. Sebaliknya komunikasi dianggap gagal jika peserta komunikasi menafsirkan bahasa ke arah pemahaman yang berbeda. Upaya yang perlu dilakukan demi keberhasilan komunikasi ialah mengurangi munculnya implikatur, karena implikatur dapat dianggap sebagai ejekan atau penanda ketidakhormonisan hubungan pihak-pihak yang berkomunikasi

Penutup

Implementasi otoritas bahasa beserta implikasi yang ditimbulkannya di Indonesia menyadarkan kita perlunya redefinisi kebijakan bahasa di Indonesia. Sejalan dengan politik negara, seperti sering disampaikan oleh kepala negara kita, bahwa negara menjadi fasilitator bagi masyarakat untuk mengatur dan memecahkan masalahnya sendiri, otoritas bahasa seyogyanya diserahkan kepada masyarakat. Masyarakat harus diberi kewenangan mengatur dan membentuk bahasanya melalui kesepakatan dan kebersamaan pemakaian. Negara sebaiknya berfungsi sebagai fasilitator untuk mencapai tujuan itu dan kemudian mengakomodasi apa yang sudah menjadi konvensi bagi masyarakat Indonesia. Kebijakan kebahasaan yang ditentukan secara otoriter melanggar hukum bahasa, khususnya yang berkaitan dengan bahasa sebagai sistem yang arbitrer dan konvensional.

Kebijakan kebahasaan yang telah dilaksanakan negara di masa lalu tidak perlu disesali karena di samping sesuai dengan politik negara waktu itu juga dipengaruhi oleh tumbuh-suburnya paham strukturalisme/formalisme di masa itu. Seiring dengan perubahan waktu dan pergeseran paradigma pemikiran, sudah waktunya kebijakan bahasa membuka pintu

bagi pandangan yang nonstrukturalis. Posmodernisme yang menjadikan kajian bahasa sebagai tanah air bagi kelahirannya sudah waktunya dipertimbangkan sehingga tidak hanya dimanfaatkan dalam kejian tentang tata kehidupan sosial (politik, hukum, ekonomi, antropologi, sosiologi, arsitektur, psikologi, sejarah, atau filsafat), tetapi juga dalam kajian bahasa. Bagi para mahasiswa yang belajar linguistik pemahaman tentang posmodernisme sangat penting untuk memperluas wawasan bahwa analisis bahasa tidak hanya bertujuan merumuskan kaidah-kaidah, tetapi juga untuk mengetahui peran bahasa untuk membentuk realita. Perluasan wawasan itu sangat penting bagi para mahasiswa agar dapat meneliti aspek-aspek bahasa yang selama ini kurang mendapat perhatian, terutama yang berkaitan dengan fungsi dan variasi bahasa.

Apa yang sudah diuraikan pada bagian terdahulu memperlihatkan kepada kita bahwa bahasa dapat dipakai untuk membaca keadaan seperti yang terjadi pada akhir masa kejayaan Orde Baru. Plesetan sebagai proses untuk menghasilkan implikatur dapat dianggap sebagai cara masyarakat menolak wacana negara untuk mencabut legitimasinya. Melalui bahasa masyarakat membentuk wacana dan melalui wacana itulah masyarakat mewujudkan cita-citanya menjadi realita.

Hadirin yang saya hormati,

Kini tiba saatnya bagi saya untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa bagi perjalanan hidup saya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang mengajar saya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah lanjutan atas. Jasa mereka saya hargai karena melalui merekalah saya memperoleh ilmu dan pengetahuan dasar yang saya butuhkan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para pengajar tempat saya memperoleh pendidikan tinggi, termasuk para pembimbing saya: Prof. Dr. J.W.M. Verhaar dan Dr. Sudaryanto (S1),

Dr. Stephanus Djawanai (S2), dan Prof. Dr. W.A.L Stokhof, Prof.Dr. Hein Steinhauer, Dr. G. Reesink, Dr. B. Voorhoeve, Prof.Dr. Maurits D.S Simatupang, Prof. Dr. Anton M. Moeliono, dan Dr. Stephanus Djawanai (S3).

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada semua panitia penyelenggara pengukuhan ini dan semua rekan dosen, asisten, karyawan, dan mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Diponegoro atas kerjasama yang baik sehingga tercipta iklim akademik yang menyenangkan. Walaupun nama-nama mereka tidak dapat saya sebut satu per satu, tetapi bantuannya telah tercatat dalam batin saya.

Khusus kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu panitia penilai usulan guru besar madya saya, baik di tingkat Fakultas atau Universitas yang telah menyetujui dan mengusulkannya ke tingkat yang lebih tinggi, saya mengucapkan terima kasih yang tulus. Kepada Prof. Dr. Sri Rahayu Prihatmi, M.A, Dekan Fakultas Sastra UNDIP, saya mengucapkan terima kasih karena berkat kebaikan hati beliau usulan kenaikan jabatan guru besar madya saya ini diproses. Begitu pula kepada Bapak Rektor/ Ketua Senat Universitas Diponegoro, Prof.Ir.H. Eko Budihardjo, M.Sc, Sekretaris Senat serta para anggota Senat -khususnya para guru besar yang menjadi "peer group" dalam penulisan pidato ini- saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas persetujuan dan rekomendasinya sehingga saya memperoleh jabatan guru besar madya.

Sudah selayaknya pula saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk mengemban jabatan guru besar madya. Semoga berkat doa restu Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian saya dapat mengemban jabatan ini dengan sebaik-baiknya.

Dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan sembah sujud dan terima kasih kepada almarhum ayah saya Bpk. Sosrosendjaja dan ibu saya Ny. Hj. Serosendjojo, yang telah mengasuh dan mendidik saya. Hal yang sama saya sampaikan kepada almarhum ayah mertua saya Bpk. H. K. Warsito dan ibu mertua saya Ny Hj.K. Warsito yang selalu membantu dengan tulus mengatasi berbagai kesulitan yang kami hadapi. Kepada almarhum ayah saya dan almarhum ayah mertua saya, saya mendoakan agar Tuhan Yang Maha Esa menerima para beliau di sisi-Nya.

Kepada ketujuh saudara kandung saya dan saudara-saudara isteri saya beserta keluarganya, saya mengucapkan terima kasih atas doa restu dan tali persaudaraan yang hangat yang tetap terjaga hingga saat ini. Ucapan yang sangat khusus saya berikan kepada isteri saya Ny. Budianti Sudaryono, dan kedua anak saya, Aswin Budi Pratomo dan Nia Budi Puspitasari. Saya berhutang budi kepada mereka karena selama kurang lebih enam tahun selama mengikuti pendidikan lanjutan, saya terpaksa sering meninggalkan mereka, dan karena itu mereka hidup tanpa kasih sayang suami dan ayahnya. Ketabahan dan ketulusan mereka dalam menerima kenyataan ini, dan dorongan serta semangat mereka sangat besar perannya bagi saya untuk memperoleh jabatan akademik yang terhormat ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang tulus atas pengorbanan mereka.

Akhirnya saya bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Pemurah yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga saya dapat melaksanakan tugas dan berkarya, dan karena itu impian saya untuk meraih jabatan akademis yang tertinggi terkabul. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua. Amien.

Wassalamu'alikum warachmatullahi wabarokatuh.

Catatan

¹Konsep bahasa bersifat arbitrer dan konvensional dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure (1916). Menurut Saussure perilaku manusia yang bersifat verbal menghasilkan tanda atau tanda bahasa. Tanda itu sendiri adalah wujud psikis yang menyatukan konsep dari citra akustis. Tanda terbentuk secara arbitrer dan konvensional. Arbitrer berarti tidak ada motivasi dalam proses pembentukan tanda, dan konvensional berarti tanda itu terbentuk atas dasar kesepakatan bersama di antara pemakai tanda itu.

Konsep bahasa sebagai sistem tanda yang dikemukakan Saussure menjadi embrio kelahiran paham posmodernisme yang menempatkan bahasa dan kajian bahasa sebagai sumber ilham atau pusat wilayah dari seluruh sejarah tatakahidupan sosial. Posmodernisme mengadopsi pikiran Saussure dan menjadikannya sebagai tesis utama, yaitu (1) hubungan realitas objek dan bahasa bersifat arbitrer dan konvensional, (2) makna ditentukan oleh sistem bahasa dan makna itu bersifat terbuka, majemuk, penuh kemungkinan, dan di luar kendali subjek tertentu (Heryanto, 1996:19).

²Keberadaan dan peran minoritas kreatif dalam suatu gerakan sosial sudah lama disadari dan semakin tampak akhir-akhir ini. Dalam sejarah pergerakan nasional dijelaskan bahwa pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimotori oleh sejumlah tokoh seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan beberapa yang lain. Pembentukan pemerintahan Indonesia melalui Sidang Umum MPR tahun 1999 dimotori oleh tokoh-tokoh seperti Abdulrahman Wahid, Amien Rais, Megawati, dan Akbar Tanjung. Tokoh-tokoh itu dapat dianggap sebagai minoritas kreatif yang mewakili keseluruhan masyarakat Indonesia di dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

³Sejak reformasi kampanye pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar sudah tidak terdengar lagi. Hal ini setidaknya-tidaknnya dapat

ditafsirkan bahwa kampanye itu kurang mencapai hasil dan mulai bergesernya ototitas bahasa dari negara menuju ke masyarakat.

⁴Martin Joos (1967) membagi ragam bahasa atas lima tingkat:

- 1 ragam beku (*frozen*) ialah ragam bahasa yang paling resmi, seperti dalam undang-undang, atau ritual agama;
- 2 ragam resmi (*formal*) ialah ragam yang dipakai dalam pidato resmi, rapat dinas/resmi;
- 3 ragam usaha (*consultative*) ialah ragam bahasa yang dipakai dalam pembicaraan biasa di sekolah, perusahaan/kantor;
- 4 ragam santai (*casual*) ialah ragam bahasa santai antarteman dalam berbincang-bincang, rekreasi, olah raga, dll.;
- 5 ragam akrab (*intimate*) ialah ragam bahasa antaranggota keluarga atau teman akrab yang ditandai oleh saling pengertian.

⁵Mengenai butir-butir Pancasila dapat dibaca pada buku-buku pelajaran PMP atau PKPN untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah lanjutan atas; atau buku-buku/bahan penataran P4.

⁶Perihal varian tingkat tutur dalam bahasa Jawa dapat dibaca pada C Geertz (1972: 171). Geertz membagi tingkat tutur dalam bahasa Jawa atas krama, (krama) madya, dan ngoko. Krama meliputi krama inggil, dan krama biasa atau krama. Krama madya atau madya tidak bervariasi. Ngoko meliputi ngoko madya dan madya.

⁷Plesetan sangat populer pada tahun 80-90-an, dan Yogyakarta dianggap sebagai pusat atau asal plesetan. Begitu populernya sehingga Universitas Gadjah Mada beberapa kali mengadakan lomba plesetan. Pada masa reformasi, terutama menjelang kejatuhan Soeharto, plesetan dipakai sebagai sarana penting untuk menyampaikan tuntutan reformasi dan sekaligus sarana penolakan yang bersifat verbal. Heryanto (1996: 102-103) membagi plesetan ke dalam 3

golongan, yaitu (1) plesetan yang sekedar berupa permainan kata-kata, (2) plesetan yang menjungkirbalikkan hierarki kebenaran, kehormatan, dan kekuasaan, dan (3) plesetan sebagai disiplin radikal yang serius.



DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict R.
1982 *"Sembah-Sumpah. Politik Bahasa dan Kebudayaan Jawa"*. **Prisma**, No.11/Th XI/hal 69-96. .
- Badudu, Yus
1985 *"Peilik-Pelik Bahasa Indonesia*. Bandung: Pustaka Prima.
- Brown, Gilliland and George Yule
1983 **Discourse Analysis** Cambridge: CPU.
- Clark, H.H
1977 *"Inference in Comprehension"* in D Laberge & .S.J. Samuel, **Basic Proces in , Reading: Perception and Comprehension**. New York: Lawrence Erlbaum.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
1993 **Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa**. Jakarta: Depdikbud.
- Dhakidae, Daniel
1996 *Bahasa, Jurnalisme, dan Politik Orde Baru*, dalam Yudi Latif dan Idi Subandi Ibrahim, **Bahasa dan Kekuasaan**. Bandung: Mizan.
- Geertz, C
1972 *"Linguistic Etiquette"* dalam J.B Pride dan Janet Holmes (ed.) **Sociolinguistics**. Middlesex: Penguin.
- Heryanto, Ariel
1996 *"Bahasa dan Kuasa: Tatapan Posmodernisme"*, dalam Yudi latif dan Idi Subandi Ibrahim, **Bahasa dan Kekuasaan**. Bandung: Mizan.

- Kaswanti Purwo, Bambang
1999 "Pendekatan "Otoriter" Berbahasa Baku Justru Jadi Bumerang" **Kompas** 17 November 1999.
- Illich, Ivan
1980 "*Vernacular Values*". **Co-Evolution Quarterly**. Summer. hal. 23-49.
- Joos, Martin
1964 **The Five Clocks**. New York: Harcourt-Brace World Inc.
- Kridalaksana, Harimurti
1976 "*Tatacara Standarisasi dan Pengembangan Bahasa*, dalam Halim (ed).. hal. 35-44.
- Leech, Geoffrey
1993 **Principles of Pragmatics**. London: Longman.
- Levinson, S.C
1986 **Pragmatics**. Cambridge: CUP
- Matheson Hooker, Virginia
1996 "*Bahasa dan Pergeseran Kekuasaan di Indonesia: Sorotan terhadap Pembakuan Bahasa Orde Baru*". dalam Yudi Latif dan Idi Subandi Ibrahim, **Bahasa dan Kekuasaan**. Bandung: Mizan.
- Mcklanzie, Malcolm
1995 "*Apa yang Selalu Saya Ketahui Tanpa Diberitahhu: Eufemime, Wacana Sekolah dan Pemberdayaan* ,"dalam Norman Fairclough **Kesadaran Bahasa Kritis**, diterjemahkan oleh Hartoyo. Semarang: IKIP Press.
- Moedjanto, G.
1985 "*Konsolidasi Kedudukan Dinasti Mataram Lewat Pengembangan Bahasa Jawa*", **Basis**, No. 7-8/Th. XXXIV.

- Moeliono, Anton M.
1985 **Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**
Jakarta: Djanbatan.
- Parkin, D.
1981 **Semantic Anthropology**. London: AP.
- Saussure, F de
1916 **A Course in General Linguistics**. New York:
Philosophical Library.
- Sumantri, Maman
1977 **Sejarah dan Perkembangan Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa**. Jakarta: PPPB.
- Tampubolon, D. P.
1994 "*Bahasa dan Tanggung Jawab Kemanusiaan*
dalam Liberty P. Sihombing (ed.) **Bahasawan
Cendekia, Seuntai Karangan untuk Anton M
Moeliono**. Jakarta: PT Intermedia.
- Wardhough, R.
1986 **An Introduction to Sociolinguistics**. Oxford
Basil Blackwell.
- Whorf, Benjamin Lee
1958 "*Science and Linguistics*" dalam Maccoby (ed)
Reading in Social Psychology. New York: AP.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Sudaryono
Kelahiran : Yogyakarta, 28 Mei 1952
Pekerjaan : Dosen Fak. Sastra, Universitas Diponegoro, Semarang
Pangkat/Jabatan : IV/B/Guru besar madya
Istri : Ny. Budianti Warsito
Anak : 1. Aswin Budi Pratomo (FT UNDIP)
2. Nia Budi Puspitasari (SMU 5 SMG)
Agama : Islam
Alamat : Jln Jaengli Perbalan 25 Semarang, teipon 024 - 478209

Pendidikan Utama

1. SD Negeri Yogyakarta, lulus tahun 1964
2. SMP Kanisius Yogyakarta, lulus tahun 1967
3. SMA Negeri Yogyakarta, lulus tahun 1970
4. Fakultas Sastra, UGM Jurusan Sastra Indonesia, Sarjana 1978
5. Fakultas Pascasarjana, UGM Program S-2, Jurusan Ilmu-ilmu Humaniora, Sarjana Utama 1985
6. Program S-3 sandwich program Universitas Leiden, Belanda-Universitas Indonesia lulus 1992

Pendidikan Tambahan (Penataran/Pelatihan)

1. Penataran Morfoologi dan Sintaksis Tahap I-IV atas kerja sama Pusat Bahasa dengan Rijksuniversiteit Leiden, tahun 1979-1980.
2. Penataran Linguistik Umum diselenggarakan oleh Fakultas Sastra UNDIP dan Konsorsium Sastra dan Filsafat, Depdikbud, Maret 1981.
3. Kursus Intensif Bhs Inggris di UNDIP, 12 Januari-18 April 1986.
4. Kursus Intensif Bhs Inggris di *SOAS University of London* Agustus- September 1989.
5. Kuliah Linguistik Historis Komparatif di Johann Wolfgang Goethe Universita't, Frankfurt, Jerman, Desember 1989.
6. Kuliah Bidang Linguistik di Rijksuniversiteit, Leiden, 1989-1991.

7. Kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan dan Metodologi Penelitian pada Program Pascasarjana, Universitas Indonesia 1990.

Pengalaman Kerja

1. Asisten Peneliti pada Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, 1975-1979.
2. Dosen Fakultas Sastra UNDIIP, 1979-sekarang.
3. Dosen Korespondensi Indonesia pada Pendidikan dan Pelatihan, Kantor Wilayah Usaha Telekomunikasi VI (PT Telkom) Semarang, 1980-1985
4. Pengasuh "Bina Bahasa" pada Harian Suara Merdeka, Semarang, 1982-1984.
5. Dosen Bahasa Indonesia pada Universitas Katholik Sugija Pranata, Semarang, 1984-sekarang
6. Dosen/Penguji Ujian Negara Korespondensi Bahasa Indonesia pada Akademi Sekretaris Marsudi Rini, Semarang, 1987-1989.
7. Redaktur Majalah Lembaran Sastra, diterbitkan oleh Fakultas Sastra, Universitas Diponegoro, 1982—sekarang.
8. Dosen tamu Bahasa dan Kebudayaan Indonesia di James Cook University, Australia, 1993.
9. Senior Fulbright Scholar in Resident (dosen tamu) Bahasa dan Kebudayaan Indonesia di University of Wisconsin, Amerika Serikat, 1994.

Karya Tulis (Buku)

1. *Surat-Menyurat Dalam Bahasa Indonesia*, Penerbit Alumni 1982.
2. *Geograf Dialek Bahasa Jawa Kabupaten Rembang* 1988 (Tim).
3. *Geografi Dialek Bahasa Jawa Kabupaten Demak* 1989 (Tim).
4. *Geografi Dialek Bahasa Jawa Kabupaten Temanggung*, 1990 (Tim).
5. *Negasi dalam Bahasa Indonesia* diterbitkan oleh Pusat Bahasa, 1995.

Penelitian Ilmiah

1. *"Reduplikasi verba dalam Bahasa Indonesia"* Skripsi, 1975.
2. *Nilai Anak Bagi Orang Tua,* Tim Pusat Penelitian dan Studi

Kependudukan UGM, 1975.

- 3 *"Pola Pemukiman Transmigrasi di Indonesia"* Tim Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM, 1976.
- 4 *"Kehidupan Sosial Ekonomi Bumi Tani di Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta"* Tim Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM, 1977.
- 5 *"Pola Perkawinan di Jawa Tengah"* Tim Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM, 1978.
- 6 *"Perihal Fungsi Sintaktis dalam Bahasa Indonesia"* Skripsi Sarjana, 1978.
- 7 *"Survey Colon Transmigran dan Jawa Tengah"* Tim Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM, 1979.
- 8 *"Distribusi dan Cakupan tidak dan bukan"* 1980.
- 9 *"Beberapa Masalah Negasi dalam Bahasa Indonesia"* 1981.
- 10 *"Geografi Dialek Bahasa Jawa Kabupaten Rembang"* 1982.
- 11 *"Geografi Dialek Bahasa Jawa Kabupaten Temanggung"* 1983.
- 12 *"Geografi Dialek Bahasa Jawa Kabupaten Kudus"* 1984.
- 13 *"Geografi Dialek Bahasa Jawa Kabupaten Demak"* 1985.
- 14 *"Kosa Kata Bahasa Jawa dalam Kesusasatraan Indonesia Modern"* 1985.
- 15 *"Multilingualisme dalam Dua Karya Sastra Indonesia Modern"* Tesis S-2, 1985.
- 16 *"Struktur Narasi Manaqib Sjeih Abdal Qadir Jaelani"* 1986.
- 17 *Kampanye Pemilu 1997*. Laporan penelitian Post Doctoral UNIDIP 1997.
- 18 *Negasi dan Sopan Santun*. Laporan penelitian mandiri, 1998.
- 19 *Nilai Kepahlawanan dalam Cerita Panji*, (Tim) 1995.
- 20 *Interferensi Bahasa Indonesia dalam Bahasa Jawa* (Tim) 1996.
- 21 *Aspek dalam Bahasa Jawa* (Tim) 1997.
- 22 *Pernyataan Kala dalam Bahasa Jawa* (Tim) 1998.
- 23 *Pernyataan Ingkar dalam Bahasa Jawa* (Tim) 1999.
- 24 *Ketunggalan dan Ketaktunggalan dalam Bahasa Jawa* (Tim) 2000.

Makalah/Artikel

- 1 "Negasi dalam Kalimat Interogatif" (Seminar Penataran Morfologi Sintaksis di Tugu, Bogor) 1980.
- 2 "Kalimat Bebas Negatif" (Forum Linguistik Fak. Sastra UI) 1981.
- 3 "Negasi Ganda dalam Bahasa Indonesia" (Konggres MLI di Surakarta) 1982.
- 4 "Negasi dalam Kalimat Imperatif" (Pertemuan Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia se Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Surakarta) 1982.
- 5 "Akulturasi dalam Bahasa Indonesia" (Lembaran Sastra) 1983.
- 6 "Hambatan Perguruan Tinggi di Indonesia" (Lembaran Sastra) 1984.
- 7 "Reduplikasi Numeralia dalam Bahasa Indonesia" (Lembaran Sastra) 1985.
- 8 "Kosa Kata Bahasa Jawa dalam Bahasa Indonesia" (Pertemuan Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia se Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta) 1985.
- 9 "Struktur Manaqib Sjah Abdul Qodir Jaelani" (Lembaran Sastra) 1986.
- 10 "Kalimat Bebas Negatif dalam Bahasa Indonesia" (Pertemuan Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia se Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Magelang) 1987.
- 11 "Konstruksi Korelatif Berunsur Negasi" (Konggres MLI di Ujung Pandang) 1988.
- 12 "Negasi dan Kuantitas" (Konggres MLI di Semarang) 1990.
- 13 "Masa Depan Bahasa Indonesia" (Bulan Bahasa Fakultas Sastra UNDIP) 1991.
- 14 *Pelajaran Membaca untuk Kelas Pemula*, makalah Jakarta, 1995.
- 15 *Pendekatan Komunikatif Integratif dalam Pelajaran Membaca* makalah Padang 1996.
- 16 *Negasi dan Sopan Santun* dimuat dalam Kajian sastra 1998.
- 17 Puluhan artikel mengenai bahasa dan kebudayaan Indonesia dirnuat dalam mass media ibukota dan daerah.